

PENGARUH POLITIK PRESIDEN ABDUR RAHMAN WAHID TERHADAP STABILITAS PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh

Arda Jati Kurnianingtyas, Anggar K, YB Yurrahman

Abstrak

Masa kecil Abdur Rahman Wahid diisi dengan hal-hal yang bersifat edukatif sehingga pada dewasa ia sangat pandai dan memahami dalam semua hal terutama yang menarik menurutnya. Hal tersebut yang membuatnya tumbuh menjadi orang yang cerdas dan berpengaruh terhadap orang banyak khususnya bagi umat dan negara. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdur Rahman Wahid mengalami beberapa kali perubahan Menteri. Hal ini dilakukannya untuk mencari dan menyeleksi kandidat terbaik yang ada di Pemerintahannya. Selain untuk mengurangi pengeluaran negara dengan memberi gaji pada karyawan, pembubaran departemen penerangan dan sosial dilakukan untuk memberikan kebebasan hak kepada para pers. Untuk lebih memanfaatkan departemen yang ada dalam bekerja maka dibentuklah departemen yang khusus menengani kelautan dan perikanan. Menteri yang tidak beres dalam kinerjanya dan akan merugikan negara langsung diberikan sanksi tegas oleh Presiden. Dalam masa pemerintahan Abdur Rahman Wahid dibentuk beberapa badan yang bertugas untuk memberantas praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Beberapa badan tersebut dibentuk dalam rangka memerangi praktek korupsi sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara, Semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Abdur Rahman Wahid dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara yang pada saat itu sedang dalam kondisi terpuruk. Dengan terbentuknya Bank Nusumma yang didirikan oleh Presiden Abdur Rahman Wahid dapat sedikit menolong perekonomian negara dengan meminjamkan modal bagi rakyat kecil yang ingin mendirikan usaha kecil menengah.

Kata Kunci: Pengaruh, Politik, Abdur Rahman Wahid, Perekonomian.

Latar belakang

Abdur Rahman Wahid merupakan seorang tokoh fenomenal dengan gayanya yang unik dan khas, ia kerap dipanggil Gus Dur. Gus merupakan nama kehormatan yang diberikan kepada anak kyai yang berarti *mas*. Adapun nama lengkap dari Gus Dur adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Nama Wahid diambil dari nama ayahnya Wahid Hasyim (Irwan Suhanda, 2010: 13). Abdur Rahman Wahid terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden dalam sidang umum MPR tanggal 20 Oktober 1999. Kepemimpinan mereka memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang pada waktu itu dilanda krisis ekonomi dan politik sangat menanti perbaikan yang akan dilakukan oleh pasangan Abdur Rahman Wahid-Megawati (Al-Zastrow N.G. 1999:

34). Dengan terpilihnya Abdur Rahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil Presiden memberikan harapan baru bagi rakyat yang selama ini menunggu perbaikan di segala bidang terutama di bidang ekonomi yang pada saat itu mengalami krisis moneter.

Gebrakan pertama Abdur Rahman Wahid menjadi Presiden ke-empat Republik Indonesia adalah menghapus eksistensi Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Presiden menegaskan bahwa penghapusan itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (Otda) (Irwan Suhanda, 2010: 15). Kedua departemen tersebut dianggap tidak bekerja sesuai dengan tugasnya dan merugikan negara sehingga dibubarkan oleh Abdur Rahman Wahid.

Selain dari kebijakan di atas tersebut, Abdur Rahman Wahid juga melakukan penghapusan badan koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama orde Baru menjadi alat represif negara. Kebijakan ini merupakan cermin gagasan besar Presiden untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat. Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis (Dewi Fortuna dkk. 2002: 45). Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada pengaruh politik Abdur Rahman Wahid terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia.

Latar Kehidupan Abdur Rahman Wahid

Abdur Rahman Wahid atau yang lebih di kenal Gus Dur merupakan priden ke-4 Indonesia. Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang Jawa

Timur, dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Hj Solehah. Ayah Gus Dur merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Masa kecil Abdul Rahman Wahid diisi dengan hal edukatif. Bersama ayahnya, Abdul Rahman Wahid belajar ilmu agama. Abdul Rahman Wahid memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya untuk belajar. Beliau mempunyai hobi membaca. Selain itu, beliau juga mempunyai hobi yang sama dengan seperti anak-anak diusianya, selain membaca, beliau juga mempunyai hobi main bola, catur dan musik.

Ketika beranjak remaja Abdul Rahman Wahid hijrah ke Yogyakarta dan Tegalrejo, beliau ke Yogyakarta dengan tujuan menimba ilmu, setelah menimba ilmu tersebut beliau kembali lagi ke Jombang, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan studi ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir Abdul Rahman Wahid melamar Sinta Nuriyah dan untuk pernikahan tersebut berlangsung di Mesir. Beliau mengawali karirnya sepulang dari Mesir. Abdul Rahman Wahid sepulang dari Mesir memilih menjadi dosen di Universitas Tebu Ireng, selain menjadi dosen, beliau juga menjadi penulis. Melalui tulisan tersebut beliau menuangkan pemikirannya dan mendapatkan banyak respon dari pembaca.

Ditahun 1999 Abdul Rahman Wahid terjun di dunia politik, Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut (Al-Zastrow, 1999: 35). Pemilu tidak hanya dijadikan sebagai ajang pemilihan pemimpin yang baru, namunkali ini Pemilu diharapkan memberikan keadaan baru bagi kondisi Negara yang sedang mengalami multikrisis.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie

kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut (Al-Zastrow, 1999: 35). Pemilu tidak hanya dijadikan sebagai ajang pemilihan pemimpin yang baru, namunkali ini Pemilu diharapkan memberikan keadaan baru bagi kondisi Negara yang sedang mengalami multikrisis.

Kebijakan Politik Presiden Abdur Rahman Wahid

Abdur Rahman Wahid merupakan presiden ke 4 Indonesia. Ketika menjabat menjadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh Abdur Rahman Wahid, kebijakan tersebut diantaranya:

1. Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Abdur Rahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur ini mengalami beberapa kali perubahan Menteri. Hal ini dilakukannya untuk mencari dan menyeleksi kandidat terbaik yang ada di Pemerintahannya. Tak hanya sebatas penggantian sejumlah menteri, bahkan Abdur Rahman Wahid membuat kabinet baru yang duberi nama cabinet Persatuan Indonesia. Di dalam kabinet ini diisi oleh orang-orang pilihan Presiden yang dianggapnya terbaik dan mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kehendaknya.

2. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial

Selain untuk mengurangi pengeluaran negara dengan memberi gaji pada karyawan, pembubaran departemen penerangan dan sosial dilakukan untuk memberikan kebebasan hak kepada para pers. Untuk lebih memanfaatkan departemen yang ada dalam bekerja maka dibentuklah departemen yang khusus menengani kelautan dan perikanan . departemen ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dengan mengeksplor segala sumber daya yang ada.

3. Pemecatan sejumlah Menteri

Pemecatan sejumlah menteri yang dilakukan oleh Presiden Abdur Rahman Wahid bukan tanpa alasan. Menteri yang tidak beres dalam kinerjanya dan akan merugikan negara langsung diberikan sanksi tegas oleh Presiden. Hal ini dilakukan karena ia tidak ingin ada kecurangan dalam pemerintahannya. Selain alasan tersebut, pemecatan juga dilakukan karena adanya beberapa keterkaitan antara Menteri dengan Orde Baru yang banyak mengalami kasus yang sangat merugikan negara.

Dampak Kebijakan Politik Presiden Abdur Rahman Wahid

Abdul Rahman Wahid menjabat menjadi presiden ke 4 Indonesia tidak berlangsung lama dari tahun 1999 samapi dengan 2001, tetapi selama menjabat menjadi presiden beliau mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk Indonesia. Dampak dari kebijakan politik yang dibuat oleh Abdul Rahman Wahid diantaranya:

1. Terbentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut ekonomi pada saat itu yang sedang dalam kondisi tidak stabil akibat krisis moneter yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini Presiden memilih beberapa orang penting yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah perekonomian dalam kabinet kerjanya yaitu Prof. Dr. Emil Salim sebagai ketua, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. Tiga orang tersebut adalah orang-orang terbaik pilihan Abdul Rahman Wahid yang dipercaya untuk mengatasi perekonomian dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

2. Pemberantasan KKN

Dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi lembaga negara seperti KPK tidak bisa melakukannya sendiri, butuh dukungan dari masyarakat. Korupsi memang sudah menjadi masalah yang sangat kompleks sehingga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam masa pemerintahan Abdur Rahman Wahid dibentuk beberapa badan yang bertugas untuk memberantas praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Beberapa badan tersebut dibentuk dalam rangka memerangi praktek korupsi sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara.

3. Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma

Langkah Presiden Abdur Rahman Wahid dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem patut menjadi teladan. Selain untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang tidak stabil, Berdirinya Bank Nussuma juga dapat merekatkan dua etnis yang berbeda latar belakang. Langkah pembentukan Bank Nussuma memang sangat membantu pada saat itu dengan kondisi perekonomian rakyat yang serba sulit. Meskipun dalam pembangunannya mengalami berbagai

masalah, namun hal itu tidak menghentikan langkah Presiden untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sudah menjadi tugas dan kwajibannya.

Simpulan

Perjalan karir yang dilalui oleh Abdur Rahman Wahid memang tidak semuanya mulus, tetapi juga melalui beberapa kendala. Selama menjadi presiden, Abdur Rahman Wahid mendapat berbagai kecaman mengenai kebijakan yang diambil karena dinilai kurang tepat dengan kondisi yang ada. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdur Rahman Wahid mengalami beberapa kali perubahan Menteri. Hal ini dilakukannya untuk mencari dan menyeleksi kandidat terbaik yang ada di Pemerintahannya. Selama menjadi presiden banyak peraturan-peraturan yang beliau buat, yang mana juga bermanfaat untuk Indonesia. Peraturan –peraturan tersebut diantaranya . Selain untuk mengurangi pengeluaran negara dengan memberi gaji pada karyawan, pembubaran departemen penerangan dan sosial dilakukan untuk memberikan kebebasan hak kepada para pers. Dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi lembaga negara seperti KPK tidak bisa melakukannya sendiri, butuh dukungan dari masyarakat. Semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Abdur Rahman Wahid dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara yang pada saat itu sedang dalam kondisi terpuruk. Dengan terbentuknya Bank Nusumma yang didirikan oleh Presiden Abdur Rahman Wahid dapat sedikit menolong perekonomian negara dengan meminjamkan modal bagi rakyat kecil yang ingin mendirikan usaha kecil menengah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur*, Analisis Wacana Kritis, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Al-Zastrow N.G. 1999. *Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- Afandi Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amin Rais*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Anam Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala : Jatayu, 1985.
- Anggar Kaswati, 1998. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Barton Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Bisri A. Mustofa. *Abdurahman Wahid Selama Era Lengser*. Yogyakarta, 2002.
- Choirie Efendi. *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.

